

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PELATIHAN PEMANFAATAN WEBSITE DESA DAN INTERNET DASAR PADA PEKON BUMI AYU KECAMATAN PAGELARAN

Muhamad Muslihudin¹, Suyono², Riki Renaldo³

¹Prodi Sistem Informasi, STMIK Pringsewu, Lampung

²Prodi Manajemen Informatika, STMIK Pringsewu, Lampung

³Prodi Ekonomi Syariah, STEBI Tanggamus, Lampung

^{1,2}Jl. Wisma Rini, No.09 Pringsewu, Lampung

³Jl. Soekarno Hatta (Islamic Centre) Kota Agung, Tanggamus, Lampung

E-mail: muslihduinstmikpsw@gmail.com, yono.psw@gmail.com, rikirenaldo@gmail.com

Abstrak

Teknologi internet yang kini sudah menjadi tuntutan hidup harus dimanfaatkan secara optimal. Sebuah kemajuan jika pemerintah mulai mengadopsi teknologi tersebut sebagai infrastruktur utama pelayanan publik. Dalam tulisan berikut mencoba menguraikan seberapa besar pemerintah serius menggarap *e-government system* dalam pelayanan publik. Pelayanan Negara terhadap warga negaranya merupakan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 dan diperjelas kembali dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif. Pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintahan atau korporasi untuk dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Kata Kunci: *E-government System*, Pelayanan Publik, Korporasi

Abstract

Internet technology which has now become a demand for life must be used optimally. A progress if the government began to adopt the technology as the main infrastructure of public services. In the following article, we try to describe how serious the government is in working on an e-government system in public services. State service to its citizens is a mandate stated in the 1945 Constitution and clarified again in Law no. 25 of 2009 concerning Public Services. The Law on Public Services regulates the principles of good governance so that government functions can run effectively. Public services are carried out by government agencies or corporations to strengthen democracy and human rights, promote economic prosperity, social cohesion, reduce poverty, increase environmental protection, be wise in the use of natural resources, deepen trust in government and public administration.

Keywords: *E-government System, Public Service, Corporation*

I. PENDAHULUAN

Teknologi merupakan bentuk perkembangan jaman. Seluruh manusia di muka bumi dipaksa untuk membuka mata pada perubahan teknologi yang sedemikian cepat dan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Tak dipungkiri, kemajuan teknologi mempercepat segalanya, termasuk pelayanan publik. Sudah bukan rahasia umum jika pelayanan publik di negeri ini dapat dikatakan jauh panggang

dari api. Cepat hanya untuk pihak-pihak tertentu. Keberadaan teknologi diharapkan menjadi jawaban untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan. Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan adalah belum meratanya infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa. Akibat menghadapi berbagai permasalahan terkait pembangunan dan keterbatasan infrastruktur, maka penggunaan dan pemanfaatan TIK tidak dijadikan prioritas utama oleh pemerintahan desa. Namun di balik keterbatasan tersebut, muncul desa-desa yang mampu menggunakan dan memanfaatkan TIK guna mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa, sehingga mampu meningkatkan pembangunan desa tersebut. Kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan perdesaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang. Kesenjangan tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai faktor di antaranya kesenjangan infrastruktur antara kota dan desa, maupun tingkat kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan perangkat TIK seperti telepon seluler, komputer, maupun internet, serta ketersediaan SDM TIK, yang berpengaruh terhadap pemanfaatan TIK di tingkat desa.

Kebijakan dan program-program pemerintah pusat sering menempatkan desa sebagai objek bukan sebagai subjek, program-program pemanfaatan TIK hanya sampai pada tingkat kabupaten atau kecamatan. Oleh karena itu, dengan munculnya gerakan dari desa yang dapat menyelenggarakan pemerintahan secara baik dan mandiri, yang didukung dengan pemanfaatan TIK, menjadi pelajaran bahwa inisiatif tersebut dapat dilakukan dari bawah. Dengan demikian desa tersebut mampu melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan desa itu sendiri. Di antara pemanfaatan TIK oleh desa misalnya: (1) Penggunaan piranti lunak sumber terbuka dalam kegiatan operasional (Mustika, 2011); (2) Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan membangun jejaring antar desa (Desa Madusari, 2013); (3) Pembuatan website/blog guna keperluan diseminasi informasi kegiatan yang dilakukan oleh warga maupun aparat desa, meningkatkan penyebaran informasi sampai melewati batas wilayah (Gerakan Desa Membangun, 2014); (4) Penggunaan sistem informasi untuk melaksanakan pelayanan publik, memperkenalkan potensi desa maupun menyosialisasikan pembangunan desa (Jahja, 2012). Hal-hal tersebut dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung kemandirian di tingkat desa.

Penelitian dilakukan Kecamatan Natar Lampung Selatan, telah memanfaatkan TIK guna mendukung pembangunan dan kemandirian desa tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberi masukan kepada berbagai pihak di antaranya, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo RI Khususnya Dinas Kominfo Kecamatan Natar Lampung Selatan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan TIK di tingkat desa, desa-desa lain yang ingin menggunakan maupun memanfaatkan TIK sesuai dengan kebutuhan desa dalam kerangka pembangunan dan mendukung kemandirian desa, maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian berfokus pada pemanfaatan TIK di tingkat desa. Penggunaan atau pemanfaatan TIK dalam penelitian ini diartikan sebagai penggunaan/pemanfaatan

TIK oleh desa untuk mendukung kegiatan pemerintah desa terkait pelayanan kepada masyarakat. Sangat penting untuk mengetahui pemanfaatan TIK di tingkat pemerintahan desa, karena desa merupakan suatu wilayah pemerintahan yang biasanya tertinggal dalam hal pemanfaatan TIK, dengan adanya inisiatif dari desa, studi mengenai pemanfaatan TIK di tingkat desa menjadi suatu hal yang perlu dilakukan. Pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana pemerintah Desa yang ada di kabupaten Pringsewu menggunakan TIK dalam menunjang kegiatan pemerintahan, dan apa manfaat-manfaat yang diperoleh dalam penggunaan TIK tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan TIK di tingkat desa melalui studi di salah satu desa di Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Kecamatan Natar Lampung Selatan yang telah memanfaatkan TIK untuk mendukung kegiatan pembangunan desa tersebut.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Governnet Bagi Aparatur Desa Kerjasama STMIK Pringsewu dan Kepala Pekon Bumi Ayu, Paegelaran. Manfaat yang didapat dari pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pringsewu adalah menambah pengetahuan dan kemampuan aparat pekon/desa untuk memperluas pemahaman serta pemanfaatan Teknologi Informasi Web Governnet Bagi Aparatur Desa guna mempersiapkan layanan desa berbasis teknologi computer.

II. METODE PELAKSANAAN

2.1. Tempat dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pelatihan Pemanfaatan Website Desa Dan Internet Dasar Pada Pekon Bumi Ayu Kecamatan Pagelaran” dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017 di Balai Desa/Pekon Bumi Ayu Kecamatan Pagelaran. Para peserta sudah berkumpul pukul 09.00 WIB. Pemaparan materi pertama dimulai pukul 09.30 WIB sampai pukul 11.00 WIB tentang manfaat layanan berbasis teknologi yang di sampaikan oleh M. Muslihudin, MTI. Materi yang kedua di lanjutkan pada pukul 13.00 sampai 15.00 praktek pemanfaatan internet dan web government didampingi oleh M. Muslihudin, MTI, Suyono, MTI dan Tim Pengembang Sistem Informasi Web Desa STMIK Pringsewu.



Gambar 1. Paparan materi manfaat internet dan web government

2.2. Paparan Teoritis

Pemecahan masalah yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Memberikan materi berupa pengetahuan tentang perkembangan internet dan peluang yang ada akibat kemajuan internet yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sistem pemerintah.
2. Memaparkan contoh-contoh penerapan teknologi informasi yang sukses dengan memanfaatkan teknologi khususnya *e-goverment* sehingga hal ini dapat menjadi contoh pengembangan dan dapat menjadi perangsang untuk melakukan perbaikan sistem pemerintahan.
3. Memberikan panduan teknik/cara memanfaatkan teknologi melalui internet khususnya *e-goverment* sebagai sarana sistem pengembangan sistem pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk mengaplikasikan dan bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas selama pemaparan materi sehingga peserta semakin mengerti tentang materi yang telah disampaikan.



Gambar 2. Peserta Pelatihan yang terdiri dari aparatur desa dan Karangtaruna

HASIL KEGIATAN

1. Perkembangan Internet Dan Peluang Bagi Sistem Pemerintahan

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan

berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa kalau dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri pada saat ini ialah 274,9 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan data tersebut bahwa pengguna internet di Indonesia meningkat secara signifikan setiap tahunnya. meningkatnya pengguna internet di Indonesia membuka peluang bagi pemerintah untuk menerapkan sistem pelayanan masyarakat berbasis online yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut E-Government membuat masyarakat semakin mudah untuk mengakses kebijakan pemerintah bahwa pemerintah menyusun program untuk berjalan lancar. E-Government juga dapat mendukung pemerintahan yang lebih efisien, dan dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah (Raidyarto, 2018).

Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain:

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat
Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum
Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh
Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien
Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja. Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara

pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:

- a. G2C (Government to citizen), hubungan antara pemerintah dengan masyarakat,
- b. G2B (Government to bussines), hubungan antara pemerintah dengan pengusaha,
- c. G2G (Government to Government), hubungan antara pemerintah dengan pemerintah.

Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya menggunakan jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya (Raidyarto, 2018).

2. Contoh Penerapan Teknologi Informasi E-Goverment

Layanan administrasi kependudukan berbasis online atau Pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri. Yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

Penerapan teknologi informasi e-government di kabupaten pringsewu sendiri sudah dilakukan seperti adanya Tata Kelola Pelaporan Pembangunan Berbasis Digital. Sistem informasi desa berbasis digital seperti pada pekon Bumi Ayu kecamatan pagelaran.



Gambar 2. Tampilan Website Sistem Inormasi Pekon Bumi Ayu Pagelaran

Dengan melihat website masyarakat desa pekon Bumi ayu dapat melihat informasi secara digital tanpa harus mendatangi kantor aparaturn pekon. Selain masyarakat pekon Bumi Ayu masyarakat kabupaten, Provinsi, bahkan

masyarakat asingpun dapat mengakses serta mendapatkan informasi terkait pekon Bumi Ayu kecamatan pagelaran dengan mudah.

3. Cara Memanfaatkan Teknologi Melalui Internet Khususnya *E-Government*

Di kalangan masyarakat, maraknya penggunaan media komunikasi berbasis internet telah mempengaruhi dan mendorong mekanisme kerja pemerintah untuk menyesuaikan kerja dan kinerjanya.

Perkembangan teknologi komunikasi yang ada telah merubah paradigma komunikasi dominan yang sebelumnya terasa berlangsung satu arah – antara pemerintah kepada masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi juga memperluas kesempatan terjadinya komunikasi dua arah, yaitu antara masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya. Disinilah terjadi perubahan atau transformasi dalam mekanisme kerja pemerintah yang kini berorientasi pada pengelolaan informasi dan strategi komunikasi.

Electronic Government atau *e-government* merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat - "The employment of the Internet and the world-wide-web for delivering government information and services to the citizens" (United Nations, 2006). Terjadinya model penyampaian informasi dua arah yang semakin mudah tidak hanya antara pemerintah dan masyarakat (*Government-to-Citizen/G2C*); tapi juga antara pemerintah dan pihak swasta (*Government-to-Business/G2B*) atau pemerintah dan pemerintah (*Government-to-Government/G2G*). Hal ini merupakan bentuk inovasi dalam strategi komunikasi, yang tentunya akan bermanfaat dalam menunjang peran dan fungsi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam kebersamaan membangun kehidupan bangsa. Tentunya manfaat yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah (Abarca, 2021).

KESIMPULAN

UU Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif. Pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintahan atau koporasi untuk dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Kegiatan berjalan dengan baik diikuti oleh antusiasme peserta yang hadir selama kegiatan berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan dan peran peserta dalam mencoba dan memberikan pertanyaan kepada Tim pengabdian hingga akhir kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrajit, Richardus. *Electronic Government*. Penerbit Andi, Yogyakarta. 2002
Kaplan Andreas. M., Haenlein, Michael. (2010). *Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*. *Business Horizon*, 53,61

- S. Yusuf, *Pemeringkatan E-government Di Indonesia (Pemerintah Provinsi)*, E-Government Lab of Computer Science Faculty, Universitas Indonesia, 2007
- Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 2, Nomor 3, Desember 2013
- Jurnal Ilmu Komunikasi, " Study Fenomenologi Rw-Net Sebagai Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Optimalisasi Fungsi E Government Di Pemerintah Kota Bandung. Vol.1 No.1 April 2010
- Abarca, R. M. (2021). LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Lampung Utara. In *Nuevos sistemas de comunicación e información*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Telekomunikasi Indonesia (2020)* (dan P. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi (ed.); Vol. 59). Badan Pusat Statistik.
- Raidyarto, A. (2018). *Analisa Strategis Kesiapan Papua Menjadi Provinsi Cerdas*. 8–9.